

**EVALUASI RENCANA TATA RUANG  
KAWASAN METROPOLITAN MINASAMAUPATA  
SEBELUM DIPERDAKAN**

**Laporan Kerja praktek (402 TP2) PADA  
KANTOR BAPPEDA TINGKAT I SULAWESI SELATAN**



**1999  
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

# LEMBARAN PENGESAHAN

## EVALUASI RENCANA TATA RUANG KAWASAN METROPOLITAN MINASAMAUPATA SEBELUM DIPERDAKAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK  
PADA KANTOR BAPPEDA TINGKAT I SULAWESI SELATAN

Oleh :



Pembimbing Kerja Praktek  
Bappeda Tingkat I Sul-Sel  
Kasi Tata Ruang dan  
Tata Guna Tanah

IR. BASRULLAH  
NIP : 010 241 273

Koordinator Kerja Praktek  
Jurusan Perencanaan Wilayah &  
Kota Univ. "45" Ujungpandang

IR. UMAR MANSYUR, MT., IAP  
NIP : 132 126 039

Mengetahui dan Menyetujui

a.n. Ketua Bappeda Tingkat I  
Sulawesi Selatan

Sekretaris



DRA. HJ. A. HUSNAH LATIEF  
PKT Pembina  
NIP : 010 137 680

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan  
Wilayah & Kota  
Univ. "45" Ujungpandang



IR. SYAFRI  
NIK : D4 50202

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami sehingga laporan kerja praktek yang dilaksanakan di Kantor BAPPEDA TK. I SULAWESI SELATAN.

Adapun judul dari laporan kerja praktek ini adalah: "Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasamaupata Sebelum di Perdakan". Mata kuliah praktek ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa khususnya Jurusan Planologi dalam rangka memenuhi persyaratan pada Fakultas Teknik Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan, antara lain disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan kami. Namun demikian kami berusaha untuk menyajikan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki.

Dengan selesainya penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis mengucapkan terima banyak terima kasih kepada :

- Bapak Ir. Mursyid Mustafa, MSi, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Ujung Pandang.
- Bapak Ir. Basrullah selaku Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada BAPPEDA Tk. I SUL-SEL yang banyak memberikan bimbingan dalam praktikan.
- Bapak Ir. Yos Harmen, MSc, selaku pembimbing kerja praktek di lapangan.
- Bapak Ir. Muchtar Nurlim, SE. MSi, selaku Kepala Bidang Penelitian dan seluruh staf BAPPEDA Tk. I SUL-SEL yang telah banyak membantu praktikan.
- Bapak Ir. M. Syafri selaku Ketua Jurusan Planologi Universitas "45" Ujung Pandang.
- Bapak Ir. Umar Mansyur, MT, selaku Koordinator KP di Jurusan Planologi Universitas "45" Ujung Pandang.

- Bapak Ir. Rudi Latif selaku mantan Koordinator KP yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penyusunan laporan kerja praktek.
- Kepada teman-teman sesama praktikan di BAPPEDA Tk. I SUL-SEL (Salman, Darsyat dan M. Nasir).
- Kepada teman-teman di Jurusan Planologi Universitas "45" Ujung Pandang khususnya angkatan 1994 (khusus Wahyudin, Sari dan Sabrun).
- Kepada orang tua, adik-adik dan kakanda Tri Mulbar yang telah banyak memberikan bantuan materi dan dorongan moril kepada praktikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi mahasiswa Planologi umumnya dan mahasiswa kerja praktek khususnya.

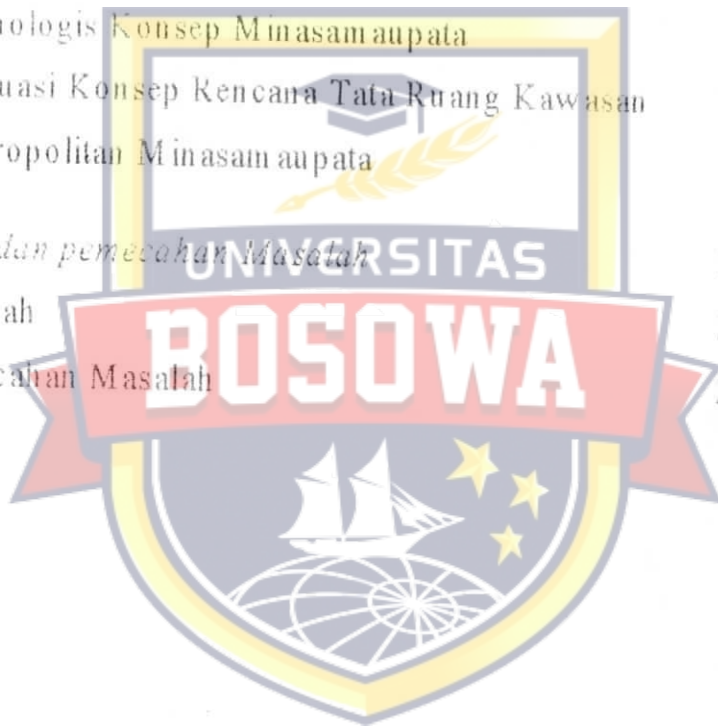
Ujungpandang, 17 Februari 1999

**Hartini**  
4594 042 060

## DAFTAR ISI

<u>URAIAN</u>	<u>HALAMAN</u>
<i>Halaman Judul</i>	i
<i>Halaman pengesahan</i>	ii
<i>Kata Pengantar</i>	iii
<i>Daftar Isi</i>	v
<i>Daftar Tabel</i>	vii
<i>Daftar Gambar</i>	viii
<i>Daftar Lampiran</i>	ix
<i>Bab I Pendahuluan</i>	1
I.1 Latar Belakang Kerja Praktek	1
I.2 Tujuan dan Sasaran kerja praktek	2
I.3 Syarat dan Prosedur kerja praktek	3
I.4 Instansi Tempat KP	5
I.5 Sistematika Penyusunan Laporan KP	6
<i>Bab II Gambaran Keadaan Bappeda Tk. I Sulsel</i>	7
II.1 Struktur dan fungsi Organisasi Bappeda Tk. I Sulsel	7
II.2 Tujuan dan kedudukan Bappeda Tk. I Sulsel	14
II.3 Mekanisme kerja Bappeda Tk. I Sulsel	14
II.4 Struktur Organisasi & Manajemen Bidang Fisik, Sarana & Prasarana	15
II.5 Staf Tenaga Ahli Bidang Fisik, Sarana & Prasarana	16
II.6 Kedudukan praktikan dalam struktur Organisasi Bidang Fisik, Sarana & Prasarana	17

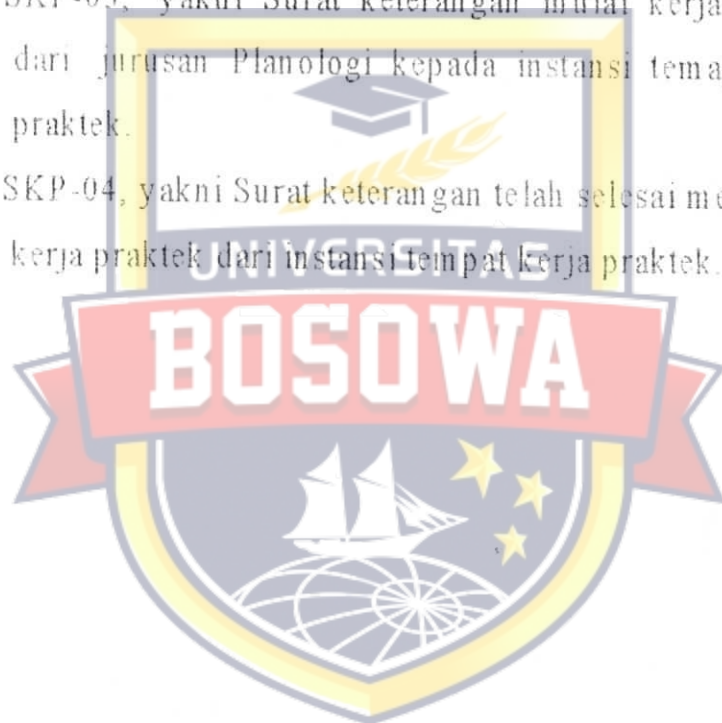
<i>Bab III Gambaran Umum Proyek</i>	18
III.1 Nama Proyek	18
III.2 Maksud dan tujuan	18
III.3 Landasan Hukum	19
III.4 Tahun Anggaran Proyek	19
III.5 Jadwal Kegiatan	20
<i>Bab IV Pembahasan</i>	21
IV.1 Pengertian Evaluasi	21
IV.2 Kronologis Konsep Minasam aupata	22
IV.3 Evaluasi Konsep Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata	22
<i>Bab V Masalah dan pemecahan Masalah</i>	24
V.1 Masalah	24
V.2 Pemecahan Masalah	24



## DAFTAR LAMPIRAN

### *Lampiran 1 :*

- a. SKP-01, yakni permohonan kerja praktek mahasiswa dari Jurusan planologi ke Instansi tempat kerja Praktek.
- b. SKP-02, yakni Surat persetujuan melaksanakan kerja praktek dari instansi tempat kerja praktek kepada jurusan Planologi.
- c. SKP-03, yakni Surat keterangan mulai kerja praktek dari jurusan Planologi kepada instansi tempat kerja praktek.
- d. SKP-04, yakni Surat keterangan telah selesai melakukan kerja praktek dari instansi tempat kerja praktek.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD "45" dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Instrumen ini dimaksudkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses pengembangan dan perkembangan yang terus menerus bergulir seiring dengan peradaban manusia secara alami maupun dengan sengaja dan berkesinambungan. Proses perkembangan merupakan dinamika dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat sehingga usaha pengendalian pengelolaan pembangunan tersebut harus disiapkan secara sistematis, rasional dan pragmatis. Pembangunan diharapkan dapat dirasakan sebagai usaha perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran diatas dalam kehidupan yang empirik/rill diperlukan pembinaan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa yang digalakkan. Manifestasinya adalah terbentuknya manusia-manusia yang handal serta diwarnai dengan daya produktifitas, keterampilan, cakap dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Khususnya perguruan tinggi sebagai salah satu wadah dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia untuk mengisi pembangunan nasional mempunyai peran utama sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu perguruan tinggi mengemban tugas



sebagai media pendidikan dan pengajaran, sekaligus penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Universitas "45" khususnya Jurusan Planologi sebagai salah satu mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk melahirkan tenaga profesional dan berkualitas yang memiliki kemampuan sebagai perencana wilayah dan kota yang mengedepankan pendekatan perencanaan yang sistematis dan menyeluruh dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, fisik dan lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan dalam segala bidang akan membutuhkan tenaga kerja dalam bidang perencanaan, yang berperan sebagai fasilitas, koordinator dan negotiator mengingat aspek keruangan (spatial) yang menuntut adanya suatu perencanaan dan pengawasan yang komprehensif. Oleh karena itu konsepsi dasar Jurusan Teknik Planologi Universitas "45" adalah meningkatkan pelatihan sebagai aplikasi teori yang didapatkan di komparasikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan agar nantinya dapat sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat sebagai tujuan pembangunan. Sedemikian rupa dirasa perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan dalam bentuk kerja praktek (KP), dimana back groundnya sebagai ilmu perencanaan yang multi disipliner.

## **I.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Praktek**

### **A. Tujuan Umum**

Secara garis besar bahwa pelaksanaan kerja praktek (KP) dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kerja di lapangan dimana mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh.

### **B. Tujuan Khusus**

Kesempatan kerja praktek bagi Jurusan Planologi diharapkan dapat memperluas cakrawala dan wawasan pemikiran serta

memiliki kepekaan suatu masalah. Dengan adanya kerja praktek tersebut mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi secara riil dan menganalisa serta memecahkan masalah-masalah di bidang perencanaan wilayah dan kota. Selain dari itu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan proyek dan bagaimana suatu proyek tersebut dikelola oleh suatu perusahaan atau instansi perencanaan.

### C. Sasaran

Sasaran kerja praktek lebih ditujukan kepada praktikan bersangkutan dalam mengaplikasikan suatu teori dengan melihat persoalan atau masalah yang dihadapi langsung saat melakukan kerjanya sehingga dapat melihat suatu bentuk kekurangan yang dimiliki baik dalam kegiatan akademik terlebih pada saat melakukan kegiatan non akademik.

## I.3. Syarat dan Prosedur Kerja Praktek

### A. Syarat Kerja Praktek

Mahasiswa yang dapat melakukan kerja praktek adalah yang memenuhi syarat karena telah melulusi mata kuliah :

- Perencanaan Wilayah
- Perencanaan Kota
- Studio Perencanaan Wilayah
- Studio Perencanaan Kota
- Perencanaan Desa Terpadu
- Metode Penelitian

### B. Prosedur Kerja Praktek

Setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas, selanjutnya mengikuti prosedur administrasi kerja praktek sebagai berikut :

1. Mengambil mata kuliah kerja praktek dalam kartu rencana studi (KRS) semester berjalan.
2. Mendaftar di Jurusan selaku peserta kerja praktek, jurusan akan memeriksa apakah mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kerja praktek (KP).
  - Meminta surat pengantar untuk mencari instansi tempat kerja praktek (ITKP) dengan meminta surat model SKP-01
  - Menghubungi dan membawa SKP-01 beserta lampiran pedoman pelaksanaan kerja praktek (LPPKP) kepada calon ITKP
  - Jika calon ITKP bersedia menerima mahasiswa untuk kerja praktek, maka ITKP tersebut harus menulis surat keterangan (Model SKP-02) kepada Jurusan Teknik Planologi, yang berisikan pernyataan tentang :
    - Kesiediaan menerima mahasiswa KP.
    - Nama pekerjaan yang akan ditugaskan serta lamanya,
    - Nama pembina KP selama KP di ITKP (Pembina adalah Staf Ahli ITKP yang membawahi pekerjaan yang ditugaskan kepada praktikan),
    - Tanggal diterimanya bekerja di ITKP.
3. Jurusan Teknik Planologi (PWK) cq. Koordinator KP akan menilai SKP-02 tersebut memenuhi kualifikasi sebagai ITKP sesuai materi yang dikerjapraktekkan. Bilamana disetujui maka jurusan akan menerbitkan surat persetujuan kerja praktek (model SKP-03) yang akan mencantumkan tanggal mulai berlakunya KP oleh mahasiswa praktikan tersebut.
4. Bilamana KP tersebut telah dinyatakan selesai maka ITKP harus membuat surat keterangan selesai kerja praktek (model SKP-04). Selanjutnya SKP-01 sampai SKP-04 harus dilampirkan dalam laporan kerja praktek (LKP).

## I. 4. Instansi Kerja praktek (ITKP)

### A. Alternatif ITKP

Berdasarkan pemantauan Jurusan, maka terdapat 3 (tiga) alternatif ITKP yang memungkinkan, yaitu :

1. ITKP pemberi kerja (Bouhwear), berupa instansi pemerintah (BAPPEDA, DTK, atau instansi sejenis) atau instansi swasta. Kedudukan praktikan dapat sebagai :
  - Asisten perencana, pada pekerjaan swakelola (umumnya instansi pemerintah) atau pekerjaan yang dibiayai sendiri (umumnya instansi swasta).
  - Asisten pengawas mutu pekerjaan perencanan yang diserahkan ke konsultan perencanaan, pemantau program kerja.
2. ITKP konsultan perencana, yang sedang melakukan kegiatan perencanaan dalam lingkup materi KP diatas. Kedudukan praktikan adalah sebagai asisten perencana.
3. ITKP pelaksana (Developer yang sedang melakukan kegiatan melakukan pembangunan sesuai dengan produk perencana tata ruang. Kedudukan praktikan adalah sebagai asisten pelaksana ataupun asisten ahli tata ruang yang akan membantu pelaksanaan mengidentifikasi dan menerjemahkan produk tata ruang yakni rencana ke program pelaksana. Penempatan praktikan untuk melakukan kegiatan perencanaan terhadap kasus buatlah (fiktif), atau sejenis, adalah tidak diperkenankan.

### B. Instansi Kerja Praktek (ITKP) Terpilih

Tempat Mahasiswa melakukan kerja praktek dapat berupa Instansi pemerintah atau badan swasta, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Instansi dimana praktikan melakukan kerja praktek adalah BAPPEDA Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, adapun uraian mengenai ITKP tersebut akan dibahas pada Bab II.

## 1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Praktek

Bagian Pertama : Pendahuluan memuat Latar belakang kerja praktek, Maksud dan tujuan kerja praktek, Syarat dan prosedur kerja praktek, Instansi tempat kerja praktek serta sistematika penyusunan laporan kerja praktek.

Bagian Kedua : Gambaran Keadaan Bappeda Tingkat I Sulawesi Selatan, memuat; Struktur dan fungsi Bappeda Tingkat I Sulsel, Tugas dan kedudukan Bappeda tingkat I Sulsel, Mekanisme tata kerja Bappeda Tingkat I Sulsel, Struktur organisasi Bidang Fisik dan Prasarana, Staf tenaga ahli Bidang Fisik & Prasarana, Kedudukan Praktikan pada struktur organisasi Bidang Fisik dan prasarana.

Bagian Ketiga : Gambaran umum Proyek, memuat; nama proyek, maksud dan tujuan proyek, landasan hukum, tahun anggaran proyek.

Bagian Keempat : Evaluasi konsep rencana tata ruang Kawasan Minasamupata; memuat hasil kerja praktek praktikan selama melakukan kerja praktek di bappeda tingkat I Sulsel.

Bagian kelima : Masalah dan pemecahan masalah, memuat masalah-masalah yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan kerja praktek.

## BAB II

### GAMBARAN KEADAAN BAPPEDA TINGKAT I SULAWESI SELATAN

#### II. 1. Struktur dan Fungsi Organisasi Bappeda Tk. I Sulawesi Selatan

##### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Kepres No. 27 Tahun 1980 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Kepmendagri No. 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai tugas :
  - Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibidang tugasnya
  - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda
  - Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar tugasnya.
- b. Wakil Ketua Bappeda Tingkat I mempunyai Tugas :
  - Mewakili Ketua dan memimpin Bappeda Tingkat I apabila Ketua berhalangan.
  - Memimpin kegiatan intern Bappeda Tingkat I sehari-hari
  - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- c. Sekretaris Bappeda Tingkat I mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Bappeda Tingkat I. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda Tingkat I
- Melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan
- Melakukan urusan keuangan

- Melakukan urusan umum.

#### d. Bidang Penelitian

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang penelitian mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan daerah.
- Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

#### e. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pembangunan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang ekonomi mempunyai fungsi :

- Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- Melakukan inventarisasi dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan-penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITADA atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

f. Bidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya mempunyai tugas dan melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan mental, spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi dan serta kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun Dinas-Dinas Daerah, organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan badan-badan yang bersangkutan.
- Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi



pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITADA atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

g. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, pemerintah daerah tingkat II dan badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah daerah tingkat I.
- Melakukan inventarisasi permasalahan dalam bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya
- Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan perencanaan yang meliputi tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELI-

TADA atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

#### B. Fungsi Organisasi Bappeda Tingkat I Sulawesi Selatan

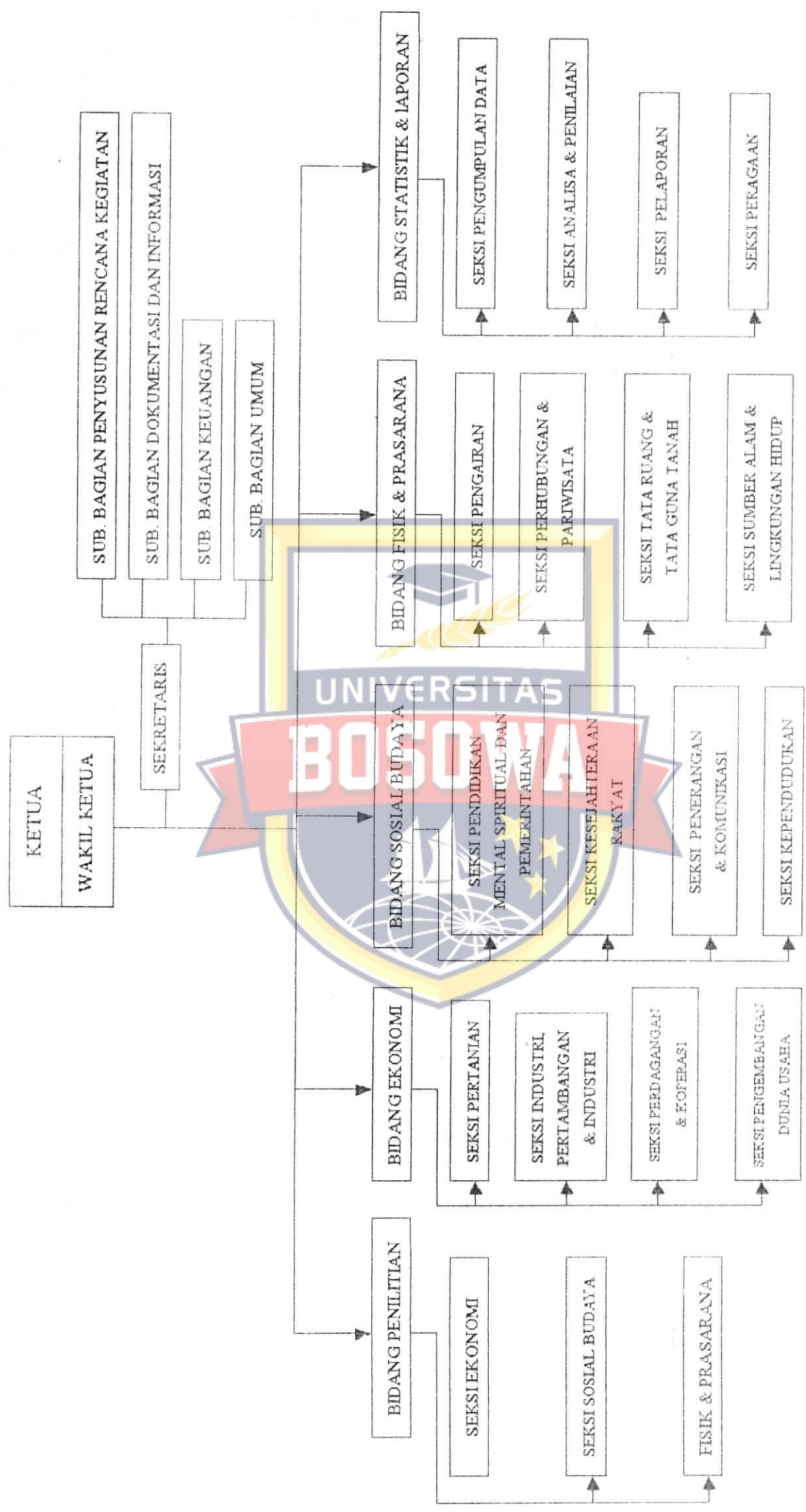
BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan merupakan koordinator dalam perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan Ekonomi, sosial Budaya, fisik dan lingkungan Hidup dalam lingkup tingkat regional (Propinsi).

BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan mempunyai tugas, membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan serta menilai atas meyelenggarakan tugas BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan Sebagai berikut :

- Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan pola Umum pembangunan daerah tingkat I.
- Menyusun REPELITADA
- Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
- Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan Daerah, Instansi-instansi pertikal, Daerah-Daerah tingkat II dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- Menyusun rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro keuangan Daerah dengan koordinasi sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
- Melaksanakan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk keopentingan perencanaan pembangunan di daerah

- Mengikuti persiapan dan perkembangan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.





## II. 2. Tugas dan Kedudukan Bappeda Tingkat I Sul-Sel

### A. Tugas Bappeda Tingkat I Sul-Sel

Bappeda tingkat I Sul-Sel mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

### B. Kedudukan Bappeda Tingkat I Sul-Sel

Kedudukan Bappeda Tingkat I Sul-Sel adalah sebagai perangkat staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

## II. 3. Mekanisme Kerja Bappeda Tingkat I Sul-sel

lembaga-lembaga yang secara formal menyusun perencanaan pembangunan di daerah tingkat I adalah :

- Bappeda Tingkat I yang bertugas untuk menyusun rencana pembangunan di daerah tingkat I dan melakukan koordinasi dan menserasikan rencana sektoral pada dinas-dinas di daerah.
- Bagian-bagian pada dinas-dinas di daerah
- Instansi-instansi vertikal daerah.

Tugas BAPPEDA Tingkat I disamping sebagai koordinasi perencanaan dinas-dinas, juga mengkoordinasikan rencana-rencana instansi vertikal di daerah dan memadukan menjadi satu rencana pembangunan yang baik. Setelah uraian rencana instansi vertikal itu dipadukan kedalam rencana pembangunan daerah dan diteruskan ke Dirjen masing-masing untuk melanjutkan selanjutnya menjadi bagian rencana departemen.

BAPPEDA Tingkat I juga mengusahakan agar adanya keterpaduan rencana pusat dan daerah, untuk itu dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dimana seluruh BAPPEDA sebagai unsur daerah dan departemen-departemen sebagai unsur pusat dalam

koordinasi nasional tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk mempertemukan usul-usul proyek nasional dan usulan daerah yang dilaksanakan menjelang penyusunan tahun anggaran.

Mekanisme kerja BAPPEDA Tingkat I sebagai aparat perencanaan adalah fisik dan prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sedangkan aparat yang bertugas untuk mengendalikan proyek-proyek di daerah adalah bidang statistik dan pelaporan. Demikian juga dengan bidang penelitian sebagai pemberi input dalam hal perencanaan dan dapat memberikan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan di daerah.

### III. 4. Struktur Organisasi dan Manajemen Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

#### A. Struktur Organisasi Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Bidang fisik sarana dan prasarana merupakan salah satu bidang dalam struktur organisasi Bappeda tingkat I Sulawesi Selatan yang menkoordinasikan kegiatan perencanaan di Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi bidang fisik sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. Kepala seksi Bidang fisik sarana dan prasarana
- b. Seksi pengairan
- c. Seksi perhubungan dan pariwisata
- d. Seksi tata ruang dan tata guna tanah
- e. Seksi sumber <sup>Daya</sup> alam dan lingkungan hidup

#### B. Manajemen Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Tugas utama bidang fisik sarana dan prasarana adalah menkoordinasikan seluruh bagian fisik baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun pihak perusahaan milik negara untuk memberikan input pada bidang lain, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan proyek pada program tahun berikutnya. Selain itu mengevaluasi berbagai rencana

pelaksanaan proyek dalam rangka pencapaian tujuan secara fungsional didalam wilayah kerja BAPPEDA tingkat I Sulawesi Selatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang fisik sarana dan prasarana melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik sarana dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan repelita daerah tingkat I Sulawesi Selatan.

## II. 5. Staf Tenaga Ahli Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai hasil yang maksimal maka diperlukan tenaga ahli di bidang fisik sarana dan prasarana. Adapun staf tenaga ahli bidang fisik sarana dan prasarana pada Bappeda Tingkat I Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sipil (IR. Andi Harun dan IR. Andi Darmawan Bintang serta IR. Saripada) : Tugasnya adalah mempersiapkan bahan penyusunan dan program pembangunan pengairan
2. Arsitektur (IR. Andi Bakti Haruni, CES) : Tugasnya mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
3. Perencanaan (Ir. Yos Harmen, MSc & Ir. Basrullah) : Tugasnya mempersiapkan bahan penyusunan dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
4. Geologi (Drs. Imbang Murjanto) : Tugasnya mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

## II. 6. Kedudukan Praktikan Dalam Struktur Organisasi Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dari pada struktur organisasi bidang fisik sarana dan prasarana kedudukan praktikan ditempatkan sebagai asisten perencana. Dalam hal ini praktikan mempunyai tugas antara lain :

- Membantu para seksi-seksi dalam pemetaan, survey lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan
- Membantu dalam perbaikan dan penyusunan dalam rangka kegiatan "Evaluasi RUTR MINASAMAPAUTA sebelum di peradakan dan penyusunan penyempurnaan Master Plan Pelabuhan Makassar".

Kedudukan praktikan adalah sebagai tim teknis dalam instansi perencana pembangunan daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Kedudukan praktikan tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi bidang fisik sarana dan prasarana berikut :

### KEDUDUKAN PRAKTIKAN PADA STRUKTUR ORGANISASI BIDANG FISIK SARANA DAN PRASARANA





## BAB III

### GAMBARAN UMUM PROYEK

#### III. 1. Nama Proyek

Nama proyek yang didalamnya terlibat praktikan adalah “Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aputa dan Penyempurnaan Master Plan Pelabuhan Makassar s.d Tahun 2018 sebelum Diperdakan “.

#### III. 2. Maksud dan Tujuan

##### A. Maksud dan Tujuan

- Untuk mengetahui sampai dimana kedalaman rencana Umum Tata Ruang Kawasan Minasam aputa yang dibuat oleh Konsultan.
- Untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Makassar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memacu pertumbuhan wilayah.
- Menilai kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam penyusunan RUTR Minasam aputa dan master Plan Pelabuhan Makassar tersebut.

##### B. Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Minasam aputa, yaitu :

- Untuk mengetahui apakah data yang benar-benar ada dianalisa dan dijadikan rencana
- Untuk mengetahui apakah rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aputa yang dibuat sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh dirjen PEMDA.
- Untuk mengetahui letak kesalahan yang terjadi dalam penyusunan rencana tata ruang yang ada.

- Untuk mengetahui apakah rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata yang ada benar-benar direncanakan sesuai dengan rencana dan peta rencana.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari analisis Master Plan Pelabuhan Makassar s.d Tahun 2018 sebelum Diperdakan adalah untuk menilai kinerja pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan Makassar dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

### III. 3. Landasan Hukum

Dalam rangka Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata, dan (Penyempurnaan) Master Plan Pelabuhan Makassar s.d Tahun 2018, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan. Maka perlu adanya landasan hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan berpedoman pada :

- Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang pada ruang yang meliputi darat, air dan udara, khususnya pada pasal 79 tentang wewenang Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia menyangkut tentang penilaian terhadap RUTR.
- Kepmendagri No. 59 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1987.

### III. 4. Tahun Anggaran

#### A. Evaluasi RUTR Kawasan Metropolitan Minasam aupata

Tahun anggaran penyusunan evaluasi RUTR Kawasan Metropolitan Minasam aupata adalah tahun 1997/1998.

#### B. Penyempurnaan Master Plan Pelabuhan Makassar

Tahun anggaran untuk penyusunan penyempurnaan Master Plan Pelabuhan Makassar terbagi dalam tiga tahap untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu :

1. Tahap I Tahun 1997 sampai 2003
2. Tahap II Tahun 2003 sampai 2008
3. Tahap III Tahun 2008 sampai 2018

### III. 5. Jadwal Kegiatan

Pekerjaan yang dilaksanakan selama kerja praktek merupakan satu paket kegiatan pekerjaan perencanaan atau dapat berupa bagian dari satu atau beberapa tahapan proses perencanaan tata ruang yang sering dilakukan seperti :

1. Kegiatan Persiapan, berupa penyusunan program perencanaan.
2. Pelaksanaan, berupa studi literatur produk rencana seperti bacaan RUTR Kawasan Metropolitan Minahasa atau sebelum diperdakan, dan master plan Pelabuhan Makassar s.d Tahun 2018. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sejauh mana daya guna dan hasil guna yang mempunyai mutu secara kualitas dan kuantitas. Praktikan tidak melakukan survey lapangan, membuat kompilasi data, dan penyusunan laporan hasil survei dikarenakan ITKP praktikan terlibat tidak menangani proyek fisik tetapi hanya menangani proyek fisik tetapi hanya menangani proyek pembinaan.
3. Penyusunan rekomendasi, berupa “ Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minahasa atau sebelum diperdakan, dan penyusunan penyempurnaan Master Plan Pelabuhan Makassar s.d Tahun 2018.

Selain tugas utama yang dilakukan praktikan ditempat ITKP tersebut diatas, ITKP juga memberikan tugas-tugas lain seperti mengikuti Rekorbang Tk. I Sulawesi Selatan, Menghitung Rekapitulasi APBD Tk. II berdasarkan sebaran sektor, program dan sumber pembiayaan, dan tugas lain yang bermanfaat bagi praktikan untuk menambah wawasan dan pengalaman.

## BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Tim kerja “Evaluasi Rencana Kawasan Metropolitan Minasam aupata” terbagi beberapa orang untuk mengevaluasi setiap bagian buku rencana yang dikerjakan oleh pihak konsultan dan bagian yang didalamnya terlibat praktikan yaitu Evaluasi konsep yang ada dalam penyusunan Rencana Tata ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata.

### IV.1 Pengertian Evaluasi

Secara umum evaluasi mempunyai beberapa pengertian yaitu :

1. Memeriksa kembali nasionalisasi proyek yang telah ditekankan dalam suatu dokumen persiapan.
2. Menentukan sampai sejauhmana proyek yang telah diidentifikasi sehingga dapat mengangkat perubahan yang diinginkan.
3. Membandingkan pencapaian yang sebenarnya dengan kelompok target dan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihannya.
4. Menentukan efisiensi dari prosedur implementasi proyek dan kualitas kepemimpinan.
5. Menentukan efisiensi ekonomi dari suatu proyek.
6. Memberikan rekomendasi bagi orang-orang yang ada di belakangnya.

Sedangkan pengertian evaluasi Rencana tata ruang yaitu penilaian terhadap sesuatu kegiatan yang telah dilaksanakan atau dibuat, dan hal ini penilaian yang dilakukan adalah terhadap Rencana tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata.

Tujuan dari evaluasi yaitu :

- Evaluasi Awal (Pra evaluation) sebelum proyek dilaksanakan.
- Evaluasi selama masa pelaksanaan (On going evaluation)
- Evaluasi selesai pelaksanaan (terminal evaluation)
- Beberapa tahun setelah selesai pelaksanaan (expost evaluation)

Evaluasi yang dikerjakan dalam proyek ini adalah evaluasi awal atau evaluasi sebelum pelaksanaan proyek.

#### IV.2 Kronologis Konsep Minasamaupata

Konsep pengembangan Ujungpandang sebagai suatu wilayah Rancana tata ruang Kawasan Metropolitan Minasamaupata yang didalamnya terdiri atas beberapa wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan kabupaten takalar diusulkan oleh beberapa pihak yaitu :

1. Tahun 1984 "Konsep Minasamaupa" oleh Unhas dan bappeda Tingkat I Sulawesi selatan.
2. 1992/1993 "Konsep Minasamaupa" oleh Dirjen cipta karya
3. 1997/1998 "Konsep Minasamaupata" Oleh Dinas Cipta Karya Tingkat I Sulawesi selatan.

#### IV.3 Evaluasi konsep Rencana tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasamaupata

- Dari ketiga usulan yang diungkapkan dari tahun 1984 sampai tahun 1998 yang diusulkan masuk dalam pengembangan kawasan Ujungpandang adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kotamadya Ujungpandang sendiri. Sedangkan Kabupaten Takalar dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasamaupata masih dipertimbangkan dengan melihat keadaan Kabupaten Takalar yang mempunyai banyak penduduk dengan wilayah yang sangat kecil dan alamnya yang kurang mendukung. (Data penduduk dan perbandingan penduduk untuk tiap kota calon perencanaan pengembangan kawasan Metropolitan Minasa Maupatan dapat dilihat pada buku Kompilasi data RTRK Minasamaupata).

Jadi kabupaten takalar dalam periode pembangunan Tahap I belum dimasukkan dalam pengembangan kawasan metropolitan Minasamaupata dan Kabupaten takalar dalam Tahap I masih terus dibina.

- Rencana Tata ruang kawasan Metropolitan Minasam aupatan telah dibuat sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh Dirjen Pemda, Karena kebijaksanaan secara khusus yang akan diperhatikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Minasam aupata adalah yang tertuang dalam Pola dasar Propensi Dati I Sulawesi selatan serta Pola Dasar Daerah tingkat II Yang bersangkutan.
- Adapun konsep-konsep dasar penataan ruang Metropolitan Region Minasam aupata mengacu pada prinsip konsep penataan ruang agropolitan yang dikembangkan oleh John Friedman dan konsep ristaller bagi pengembangan pemukiman. Konsep ini sangat cocok diterapkan karena penekanannya pada dekonsentrasi "Spatial Structure" dan sistim ekonomi yang berlaku. Dimana fokus pembangunan terletak pada terwujudnya hubungan antara pusat-pusat pelayanan dengan pusat-pusat unggulan dan industri yang berada dalam region kawasan M<etropolitan Minasam aupata.

Dalam gambaran perencanaan pengembangan Metropolitan Ujungpandang menjadi Kawasan Metropolitan Minasam aupata yang telah disusun oleh konsultan akan dipertimbangkan dengan ketiga hasil evaluasi yang telah setelah itu akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri dalam negeri untuk melaksanakan pembangunan di wilayah pengembangan Metropolitan Minasam aupata.

## BAB V

### MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

#### V. 1. Masalah

Dengan tiada maksud menjelekan terhadap apa yang dirasakan oleh praktikan selama melakukan Kerja Praktek ( KP ) berbagai masalah ditemui antara lain :

1. Praktikan tidak pernah terjun langsung ke proyek seperti halnya di konsultan, sehingga baik pihak BAPPEDA (ITKP) maupun pihak praktikan tidak terlibat dalam pembahasan tentang implementasi pihak rencana yang telah diperdakan, apakah sesuai antara produk rencana yang telah diperdakan tersebut dengan realisasinya dilapangan.
2. Kurangnya koordinasi terhadap praktikan sebelum melaksanakan kerja praktek ( KP )
3. Tidak adanya pantauan dari jurusan tentang keadaan praktikan selama melakukan kerja praktek.
4. Jurusan cenderung bersifat statis terhadap model laporan kerja praktek, karena pekerjaan yang ada di ITKP tidak bergantung penuh pada jenis pekerjaan yang digariskan oleh jurusan sebagaimana tertera pada SKP 01.
5. Dalam proses Kerja Praktek (KP) praktikan kurang aktif melakukan konsultan baik terhadap pihak jurusan maupun di ITKP.

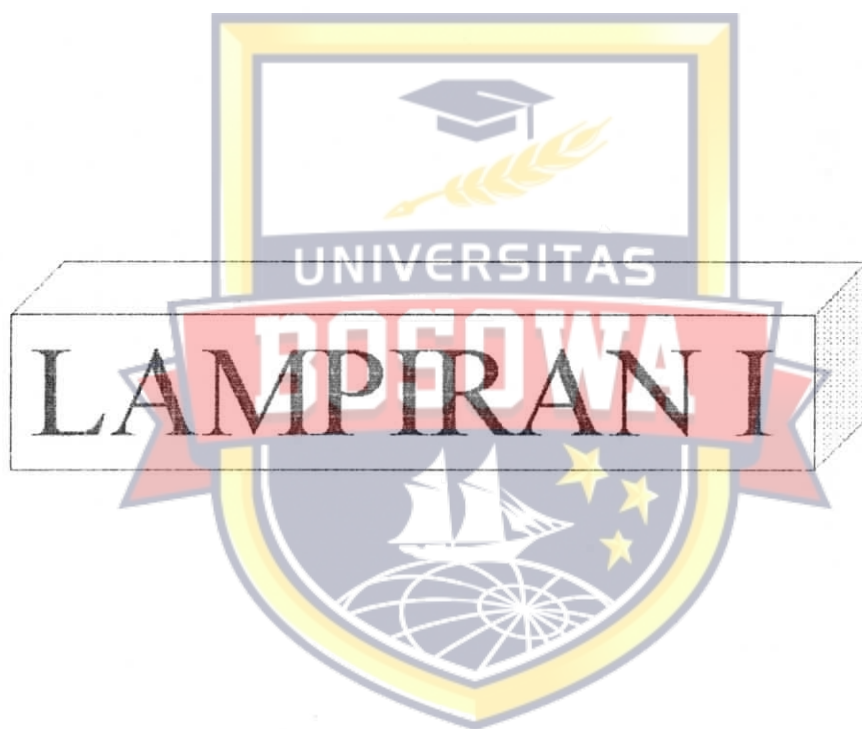
#### V.2. Pemecahan Masalah

1. Pihak ITKP seyogyanya dapat mentransparasikan informasi terhadap proyek pembinaan yang dilakukan.
2. Pihak jurusan harus memberikan informasi yang jelas kepada praktikan tentang gambar umum Kerja Praktek ( KP )
3. Pihak jurusan seyogyanya membuat pantura tentang keadaan praktikan selama melakukan Kerja Praktek ( KP )

4. Pihak jurusan sebaiknya lebih bersifat dinamis terhadap laporan Kerja Praktek sebagaimana tertera pada SKP 01.
5. Praktikan sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak jurusan dalam pemilihan ITKP dan berperan aktif dalam melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pihak jurusan maupun pihak ITKP.







# UNIVERSITAS "45"

Jl. Sekeloa Timur No. 4,  
Kec. Sekeloa Timur, Kota Ujung Pandang,  
Sulawesi Selatan 912789  
Telp. (0411) 452789  
Faks. (0411) 452789

Ujung Pandang, 10 Agustus 1998

Nomor : SKP 01/E. 533/FT/PL/U-45/VIII/1998  
Aspiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Kerja Praktek Mahasiswa

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Bappeda Tingkat I Sulsel  
di -  
Ujung Pandang

Dengan Hormat,

Dalam upaya mempersiapkan mahasiswa Jurusan Teknik  
Psikologi Universitas "45" agar mempunyai wawasan yang  
lebih luas dan siap pakai setelah menyelesaikan  
pendidikannya, maka dengan ini kami mohon kesediaan  
Bapak untuk dapat menerima mahasiswa kami, antara  
lain :

- |           |                   |           |            |
|-----------|-------------------|-----------|------------|
| N a m a : | 1. Hartini        | No. Stb : | 4594042060 |
|           | 2. Salman Ruslan  | Stb :     | 4594042072 |
|           | 3. Darsyad        | Stb :     | 4594042052 |
|           | 4. Muhammad Nasir | Stb :     | 4593042042 |

Untuk melakukan Kerja Praktek pada instansi yang Bapak  
 pimpin. Bilamana Bapak bersedia dan terdapat pekerjaan  
 yang dapat ditugaskan kepada mahasiswa Praktikan  
 sebagaimana pedoman yang terlampir.  
 Maka kami mohon kesediaan Bapak untuk menyurat kepada  
 kami tentang kesediaan menerima atau tidak mahasiswa  
 tersebut sekaligus menetapkan mulai dan selesai kerja  
 praktek dalam surat Bapak nanti.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak  
 terima kasih.

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Psikologi  
Dan Sekretaris Jurusan,

Koordinator KP

IR. RUDI LATIEF

IR. RUDI LATIEF

Menyetujui :



Pembantu Dekan I  
Fakultas Teknik

*(Signature)*

IR. HAERUDDIN C. MADDI, MSi

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK. I SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jl. Urip Sumoharjo K.M. 5 Telp. 453486 - 455167  
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang. 20 Agustus 1998

Nomor : 4234/1865/Bappeda  
Lamp :  
Perihal : Permohonan kerja  
Praktek Mahasiswa

Kepada  
Yth. Rektor Universitas 45  
Cq. Ketua Jurusan  
Plonologi  
di-  
Ujung Pandang

Membalas surat Saudara Nomor SKP.01/E.533/PT/R/UU 45/1998. Tanggal 10 Agustus 1998. Perihal tersebut diatas, maka bersama ini di sampaikan kepada Saudara bahwa dari pihak kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Kerja Peraktek pada Kantor Bappeda Tk. I Sul Sel selama 3 (Tiga) bulan, dan diharapkan Mahasiswa yang bersangkutan sudah melakukan Tugas Kerja Peraktek mulai Senin tgl. 24 Agustus 1998, dan berakhir pada tgl. 24 Nopember 1998.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Saudara untuk mendapatkan perhatian dan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

An. Ketua Bappeda Tk. I Sul Sel  
Sekretais,



Drs. H. Djamaluddin Mandung  
Pangkat : Pembina  
Nip : 580 007 234



# UNIVERSITAS "45"

Jln. Urip Sumoharjo Km.4  
Teip. (0411) 452901 - Telex 71303 Marannu UP  
UJUNG PANDANG

FAKULTAS TEKNIK

Ujung Pandang, 22 Agustus 1998

Nomor : SKP-03/E-545/FT/PL/U-45/VIII/38  
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap  
Perihal : Surat Keterangan Mulai Kerja Praktek

Kepada Yth,  
Ketua BAPPEDA TK.I SUL-GEL  
di-

T e m p a t

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bapak Nomor : 423.4/1865/BAPPEDA Perihal di  
terimanya mahasiswa kami untuk melakukan KP pada Instansi  
yang Bapak Pimpin dengan ini Jurusan Teknik Planologi  
Universitas "45" Ujung Pandang memberi tugas kepada :

Nama : 1. Hartini Stb : 4594042060  
2. Galman Ruslan Stb : 4594042072  
3. Darsyad Stb : 4594042052  
4. Muhammad Nasir Stb : 4593042042


Waktu : 24 Agustus s/d 24 Nopember 1998 (3 bulan)


Kami harapkan dengan bantuan seperlunya dari Bapak agar  
memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa  
tersebut sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Jurusan Teknik Planologi

Koordinator Kerja Praktek

  
DRS. ARBIT SADJO, MSi

  
IR. RUDI LATIF

Menyetujui :

bantu Dekan I



  
BERUDDIN.C MADDI, MSi



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK. I SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BAPPEDA**

Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Telp. 453486

**UJUNG Pandang**

*Ujung Pandang, 20 Februari 1999*

Nomor : 423 y / 69 Bappeda  
Lampiran :  
Perihal : **Penilaian Kerja Praktek**

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Teknik Planologi  
Universitas "45" Ujung Pandang  
Di,-

Ujung Pandang

Dengan Hormat,

Memenuhi surat saudara No. SKP-03/E-545/FT/PL/U-45/MIII/98 tanggal 22 Agustus 1998 perihal Kerja Praktek, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Jurusan Planologi Fakultas Teknik Universitas "45" :

Nama : Hartini  
Stb : 4594 042 060

Telah menyelesaikan kerja praktek pada Instansi kami pada tanggal 24 Agustus s/d 24 November 1998 dengan modus pekerjaan Evaluasi RUTR Kawasan Minasa Maupata sebelum diperdakan. Kami memberitahukan pula bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan Kerja Prakteknya dengan nilai sebagai berikut :

1. Nilai Pribadi

- 1.1 Keputusan kerja/disiplin ..... 75 / 80
- 1.2 Tanggung jawab dan kejujuran ..... 75 / 80
- 1.3 Kepemimpinan ..... 75 / 80
- 1.4 Hubungan kerja/koordinasi ..... 75 / 80

2. Nilai Kerja

- 2.1 Prakarsa ..... 75 / 80
- 2.2 Prestasi kerja/ketepatan waktu ..... 75 / 80
- 2.3 Mutu Pekerjaan ..... 75 / 80

Demikianlah pemberitahuan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Mengetahui**

An. Ketua Bappeda Tk. I Sulsel  
Sekretaris,-

*[Signature]*

**Dra. Hj. Husnah Latief**  
Pangkat : Pembina  
Nip : 010 137 680

Kasi Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah  
Selaku penanggung jawab Praktikan

*[Signature]*

**Ir. Basrullah**  
Nip : 010 241 273

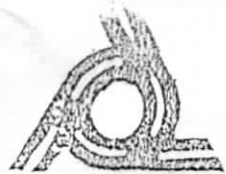


"BERITA ACARA ASISTENSI"

TUGAS  
 MATAKULIAH : Kerja Praktek  
 SEMESTER : VIII


IR. RUDI LATIEF

NO.	TANGGAL	URAIAN	PARAF
01	3 February '99 ↓ (Gin Kas Paw Dali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•&gt; Daftar :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi /</li> <li>- Tabel</li> <li>- Gambar</li> <li>- Kumpulan</li> </ul> </li> <li>•&gt; Format kertas HVS</li> <li>•&gt; Prosedur kerja KP</li> <li>•&gt; Bab II.1. Struktur Organisasi &amp; fungsi dipisah (2)</li> <li>II.4. Struktur &amp; Manajemen dipisah.</li> <li>•&gt; Susunan Tim pelaksana proyek</li> <li>II.5. Staf Pengajar Ahli:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Dipada: F. Ma. D. M. D.</li> </ul> </li> </ul> <div style="text-align: center;"> <p>UNIVERSITAS  <b>BOSOWA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjil : ...</li> <li>As : ...</li> <li>Ren : ...</li> <li>Let : ...</li> <li>EL : ...</li> <li>Me : ...</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sjil : ...</li> <li>2. As : ...</li> <li>3. As : ...</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>•&gt; Pendidikan Praktek dan proyek (Bab III)</li> <li>•&gt; Jadwal kegiatan (Bab III)</li> </ul> <p>Conference at ...</p>	



"BERITA ACARA ANJARAN"

NUGAS MATAKULIAH : SEMESTER :	No. : No. : No. :
-------------------------------------	-------------------------

NO.	TANGGAL	URAIAN	PARAF
	13/12/1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V</li> <li>- Pembahasan dan bentuk point.</li> <li>- Kettle Rapi</li> <li>  Format HVS</li> <li>- Babas Lampiran 1 &amp; 2</li> <li>- SKP 01-04</li> <li>- Sampul Rapi</li> <li>- Buat Halaman Pengesahan</li> <li>  Ass 1 x Copy</li> </ul>	
2	20/2/95	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sup 01</li> <li>- jilid 5 (dua) Register</li> <li>- Fupel Baru Muda.</li> <li>- tinta hitam</li> <li>- jilid Antora.</li> <li>- Ace 20/2/95</li> <li>- Mapulda 25/2/95</li> </ul>	